

**Politik Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat:
Kasus Ketergantungan Kebijakan Bantuan Sosial
di Temanggung, Jawa Tengah**

The Politics of Social Welfare and Community Empowerment: The Case of Social Assistance Policy Dependence in Temanggung, Central Java

Nursari Sugiastuti, Roma Ulinuha

Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: sarisugiastuti@gmail.com

Abstrak

Salah satu strategi pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial. Politik kesejahteraan sosial dari pemerintah berupa bantuan sosial ini menjadi sesuatu yang sangat fenomenal dan selalu dinantikan para penerimanya. Salah satu efeknya adalah memberikan rasa aman dan merasa ada di zona nyaman dengan istilah lain ketergantungan terhadap bantuan sosial. Tetapi ada penerima manfaat yang merasa tidak puas dengan keadaannya, mereka ingin perubahan positif dan tidak menjadi penerima bantuan sosial selamanya. Mereka melakukan perubahan secara sadar dengan melakukan pemberdayaan bersama kelompoknya sesama penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Penelitian ini merupakan field research berupa studi kasus yang berlokasi di Kabupaten Temanggung dengan objek penelitian Kelompok Usaha Bersama yang melakukan pendirian dan modal awal secara mandiri yaitu dari hasil menyisihkan sebagian uang bantuan sosial yang mereka terima. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif kualitatif sedangkan data diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi dari narasumber terkait. Artikel ini mencoba untuk meninjau tema dengan teori strukturasi dari Anthony Giddens, yang menyatakan bahwa seluruh tindakan sosial memerlukan agen dan struktur dimana agen dan struktur tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena merupakan dwi rangkap. Hal ini juga terjadi pada Kelompok Usaha Bersama selaku agen dan kebijakan pemerintah selaku struktur, keduanya saling berkaitan dan saling mempengaruhi.

Kata Kunci: bantuan sosial; pemberdayaan masyarakat; teori strukturasi

Abstract

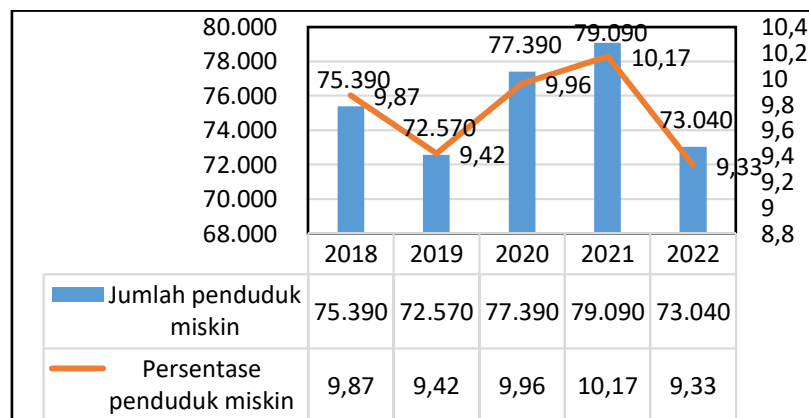
One of the government's strategies for overcoming poverty is to reduce the burden of public expenditure, which is realized in the form of social assistance. The government's social welfare policy in the form of social assistance is something that is truly phenomenal and is always eagerly awaited by the recipients. One of the effects is to provide a sense of security and feel like you are in a comfort zone, in other words, dependence on social assistance. But there are beneficiaries who are dissatisfied with their situation, they want positive changes and not to be recipients of social assistance forever. They made conscious changes by empowering their group of fellow recipients of the Family Hope Program's social assistance. This research is field research in the form of a case study located in Temanggung Regency with the research object being a Joint Business Group which carries out the establishment and initial capital independently, namely from the results of setting aside some of the social assistance money they receive. The research

method used is a qualitative descriptive method, while data is obtained from observations, interviews and documentation studies from related sources. This article tries to review the theme with Anthony Giddens' structuration theory, which states that all social action requires agents and structures where agents and structures cannot be separated from each other because they are dual. This also happens to Joint Business Groups as agents and government policies as structures, both of which are interrelated and influence each other.

Keywords: community empowerment; social assistance; structuration theory

Pendahuluan

Angka kemiskinan Nasional tahun 2022 adalah 9,57% Provinsi Jawa Tengah mempunyai angka yang lebih besar yaitu 10,93% (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022) sedangkan Kabupaten Temanggung 9,33% (BPS Kabupaten Temanggung, 2022). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Temanggung cenderung mengalami kenaikan selama rentang waktu tahun 2018-2022, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Grafik 1. Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Temanggung 2016-2022

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, diolah

Pada gambar grafik di atas dapat dilihat bahwa penduduk miskin di Kabupaten Temanggung selama 2 tahun yaitu dari tahun 2019 sampai 2021 jumlahnya meningkat 6.520 orang atau angka kemiskinan naik 0,75%. Hal ini salah satunya adalah dampak dari Pandemi covid 19. Kemudian pasca pandemi menurun 6.050 orang atau angka kemiskinan turun 0,84%, sehingga jumlah penduduk miskin di tahun 2022 ini ada pada angka 73.040 orang atau angka kemiskinan 9,33%..

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemerintah menggunakan politik kesejahteraan sosial berupa dua strategi utama yaitu yang pertama mengurangi beban pengeluaran kelompok miskin dan rentan melalui program perlindungan sosial dan subsidi. Strategi kedua adalah dengan kegiatan pemberdayaan yang bertujuan untuk

meningkatkan produktivitas kelompok miskin dan rentan agar dapat meningkatkan kapasitas ekonominya.

Terkait strategi pertama banyak program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah salah satunya melalui bantuan sosial. Program ini utamanya menasar bagi masyarakat miskin yang ada di 40% tingkat kesejahteraan terbawah dengan tujuan untuk memberikan jaminan sosial pada masyarakat tersebut. Bantuan sosial menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2019 merupakan suatu bantuan yang bisa berwujud uang, barang, atau jasa dimana bantuan tersebut dapat diberikan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/ atau rentan terhadap risiko sosial. Fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa bantuan sosial yang diberikan tidak hanya diberikan pada masyarakat miskin, salah satu penyebabnya adalah karena faktor inklusion dan eksklusion error pada data. Bantuan sosial bersifat temporer atau upaya yang tidak akan bertahan lama, karena setelah bantuan sosial habis untuk kebutuhan konsumtif maka kemiskinan akan naik lagi angkanya. (Hanif Reyhan Ghifari, 2023)

Bantuan sosial yang direalisasikan tahun 2022 dan 2023 banyak jenis dan jumlahnya, yang tujuan utama dari pemerintah adalah untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah situasi perekonomian yang tidak menentu, hal ini merupakan upaya perlindungan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan sosial, memberikan jaminan sosial, dan lainnya. Bantuan sosial yang diberikan terkesan seperti melimpah karena kebijakan dari Pusat menyampaikan bahwa bantuan sosial tidak hanya oleh pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah dan desa juga dihimbau agar turut berperanserta guna menaikkan daya beli masyarakat. Prasyarat penerima bantuan kebanyakan adalah masyarakat yang datanya masuk di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan dinyatakan layak bansos. Mereka ini dikategorikan sebagai Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, walaupun di luar itu ada juga data yang sifatnya eksklusion dan inklusion error.

Program bantuan sosial merupakan program jangka pendek, bantuan yang diberikan akan habis dalam waktu singkat karena sifatnya konsumtif, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar seperti makan dan kebutuhan konsumtif lainnya. Hal ini tidak akan mengubah masyarakat yang menerima bantuan menjadi lebih “berdaya” dan mampu mengembangkan potensi dirinya. Kondisi mereka akan relatif sama, bahkan ada kecenderungan merasa aman karena ada di zona nyaman sebagai penerima bantuan rutin per bulannya. Sehingga apabila tidak menerima bantuan di suatu waktu akan menimbulkan gelombang pengaduan yang banyak karena mereka merasa “hak” nya tidak terpenuhi dengan istilah lain ketergantungan bantuan sosial. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa besarnya perhatian dari pemerintah pada penerima PKH menghadirkan kekhawatiran di tengah di masyarakat akan timbul persepsi bahwa bansos yang diterima adalah gaji sehingga mereka akan ketergantungan pada bansos tersebut (Muhammad Iqbal dan Hasi Marto, 2022)

Agar mereka dapat meningkatkan potensinya, bisa berkembang menjadi lebih sejahtera maka harus bisa berdiri sendiri atau mandiri mengembangkan potensinya.

Diperlukan program selain bantuan sosial atau Bantuan Langsung Tunai (BLT), yaitu program yang bisa membuat mereka menjadi berdaya karena mampu mengembangkan potensinya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya. Diharapkan pada jangka panjang mereka akan dapat hidup sejahtera dan terlepas dari kemiskinannya.

Program pemberdayaan masyarakat dirasa tepat untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi, karena pemberdayaan bermakna membangkitkan SDM pada kesempatan, pengetahuan dan keterampilannya sehingga kapasitasnya bisa meningkat. Konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan arah kehidupan dalam komunitasnya. (Saparjan dan Suyitno, 2003),

Dengan pemberdayaan maka akan bisa berdiri sendiri, mampu mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarga sehingga tidak menggantungkan pada bantuan. Salah satu upaya pemberdayaan yaitu melalui kelompok Usaha Bersama (KUBE), dimana KUBE merupakan suatu wadah pemberdayaan sosial yang melakukan kegiatan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan. (Tami AZ cs, 2020). Dengan adanya kelompok maka akan saling dukung dan bekerjasama guna mencapai tujuan, yaitu tujuan untuk mandiri dan meningkatkan kesejahteraannya. Kelompok ini berdomisili di wilayah atau lokasi yang sama, anggotanya mempunyai potensi yang sama dan tujuan yang sama, kemudian berupaya mengembangkan usaha ekonomi produktif sesuai potensi yang mereka miliki secara bersama-sama. Hal ini tentu saja memerlukan pendampingan yang tidak sebentar karena mereka perlu senantiasa di berikan bimbingan dan arahan juga motivasi baik dalam kelompok maupun dalam usaha yang dikembangkannya.

Program pemberdayaan ini merupakan strategi kedua dari pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan yaitu pemberdayaan dalam rangka peningkatan produktivitas kelompok miskin dan rentan untuk meningkatkan kapasitas ekonominya. Akan tetapi program ini seakan tenggelam dengan fenomenalnya bantuan sosial, apalagi pasca pandemic covid 19 dan sekarang mendekati masa pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Empirical problem dari tema penelitian ini adalah adanya penerima bantuan sosial di Kabupaten Temanggung ada yang berinisiatif untuk berubah tidak stagnan menjadi penerima Bansos, mereka membentuk KUBE dengan modal awal yang mereka kumpulkan dari hasil menyisihkan sebagian uang bantuan sosial yang mereka terima. Mereka ingin meningkatkan kesejahteraannya dengan cara membentuk usaha ekonomi produktif. Dengan adanya bimbingan dan pendampingan dari pendamping sosial, mereka membentuk KUBE dengan jenis usaha yang disesuaikan dengan potensi yang mereka miliki. KUBE yang mereka bentuk akhirnya makin berkembang usahanya, dan dapat menambah income pendapatan bagi anggotanya.

Academic problem dalam tema penelitian ini adalah terjadinya pergeseran strategi dalam mengatasi ketergantungan bantuan sosial yang awalnya berupa *top down* yaitu

menerima kegiatan hasil kebijakan dari pemerintah sekarang terdapat usulan *bottom up*. Masyarakat semakin sadar untuk tidak selalu memprioritaskan pembangunan fisik saja, tetapi juga kegiatan non fisik berupa pemberdayaan. Kesungguhan usaha kelompok KUBE dan peran pendamping sosial, menjadi salah satu alasan kegiatan KUBE termasuk menjadi salah satu kegiatan yang diusulkan secara *bottom up* menjadi kegiatan prioritas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Aspirasi masyarakat secara *bottom up* ini merupakan salah satu wujud dari kesadaran mereka tentang perlunya upaya pemberdayaan dengan harapan bisa membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana politik kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat pada kasus ketergantungan kebijakan bantuan sosial di Kabupaten Temanggung ditinjau dengan teori Strukturasi dari Anthony Giddens?”.

Tujuan penelitian untuk menganalisis upaya pemberdayaan yang dilakukan sebagian masyarakat miskin penerima manfaat pada politik kesejahteraan sosial yang dijalankan pemerintah yaitu berupa pemberian bantuan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat di tengah situasi ekonomi yang sulit efek pasca pandemic covid 19.

Metode

Penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Kabupaten Temanggung tahun 2022-2023 ini merupakan *field research* berupa studi kasus dengan objek penelitian masyarakat miskin penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang bergabung dalam Kelompok Usaha Bersama. Studi kasus adalah suatu proses penelitian untuk menyelidiki suatu fenomena dalam kehidupan nyata dimana fenomena dan kehidupan nyata tersebut mempunyai batas yang samar. Adapun fungsinya adalah untuk membangun gambaran serta menginterpretasi kasus secara mendalam. Terdapat enam jenis pengumpulan data dalam studi kasus yaitu: 1) dokumentasi, 2) rekaman arsip, 3) wawancara, 4) observasi langsung, 5) observasi partisipan, dan 6) perangkat fisik atau kultural (Robert K Yin, 2002). Pendekatan penelitian studi kasus ini menggunakan pendekatan kualitatif yang oleh Cresswell diartikan sebagai: “*Qualitative research focuses on the process that is occurring as well as the product or outcome*”. (Cresswell, 1994)

Hal tersebut maknanya bahwa penelitian kualitatif berfokus pada proses penelitian. sehingga pada saat penelitian harus dilaksanakan secara rinci, seksama dan komprehensif sehingga dapat memperoleh informasi dan data-data yang diperlukan dengan hasil yang baik.

Pendekatan kualitatif mempunyai istilah lain *Interpretative approach* sebagaimana pendapat berikut,

“in general, the interpretative approach is the systemic analysis of socially meaningful action through the direct detailed observations of people in natural

settings in order to arrive at understandings and interpretations of how people create and maintain their social people definition of it. A person definition of a situation tells him or her how to assign meaning inconstantly shifting condition". (W. Lawrence Neuman, 2003)

Pendapat di atas menyatakan bahwa pendekatan *interpretative* adalah suatu pendekatan yang berusaha untuk melakukan analisis secara sistematis terhadap gejala sosial yang nampak sewaktu dilakukan penelitian. Penelitian ini berupaya untuk memahami dan interpretasi apa dan bagaimana yang dilakukan masyarakat dan mendefinisikan kondisi sosial suatu lingkungan dan menjelaskan perubahan yang terjadi.

Terkait dengan objek penelitian maka studi kasus yang dilakukan penulis ini bertujuan untuk meneliti fenomena masyarakat miskin khususnya penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan dengan maksud agar memperoleh gambaran yang jelas dan dapat menginterpretasi kasus yang ditemukan yaitu bahwa ternyata tidak semua masyarakat mengalami ketergantungan terhadap bantuan sosial. Objek penelitian dapat dikatakan unik karena mendirikan KUBE tanpa bantuan modal awal dari pemerintah, hal yang umumnya terjadi adalah KUBE ada karena dibentuk dan di beri bantuan permodalan dari pemerintah terlebih dahulu, akan tetapi hal berbeda terjadi di Kabupaten Temanggung dimana mereka melakukan pendirian kelompok dan modal awal secara mandiri yaitu dari hasil menyisihkan sebagian uang bantuan sosial yang mereka terima.

Observasi yang dilakukan diantaranya adalah observasi lapangan ke KUBE dan usaha ekonomi yang dijalankannya, mengikuti acara Bimbingan teknis peningkatan kapasitas bagi KUBE, monitoring pembagian bantuan sosial, dan monitoring evaluasi kegiatan KUBE. Wawancara dilakukan secara mendalam pada narasumber, diantaranya adalah pengurus KUBE, pendamping KUBE PKH dan Koordinator pendamping tingkat kabupaten, juga pada pemerintah baik pemerintah desa maupun kabupaten. Penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi dengan data dari Dinas Sosial Kabupaten Temanggung, Sekretariat PKH Kabupaten Temanggung. dan data Statistik. Dokumentasi dilakukan dengan melihat notulen rapat/kegiatan, laporan monitoring evaluasi, hasil penelitian dari artikel ilmiah dan media massa terkait topik penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer yang berasal dari hasil observasi dan wawancara kepada narasumber KUBE yang terdiri dari ketua dan anggota kelompok KUBE, narasumber partisipan seperti, pendamping sosial dan tokoh masyarakat. Sedangkan data primer berasal dari data olahan dari Dinas Sosial, Sekretariat PKH Kabupaten, dan data Statistik.

Penelitian dan selanjutnya analisis yang dilakukan memerlukan penelitian lain yang relevan terhadap tema yang diambil, hal ini bertujuan untuk mendapatkan pembandingan dan dukungan terhadap penelitian. Hasil karya dari peneliti sebelumnya yang dijadikan bahan pembandingan adalah tesis yang meneliti tentang KUBE PKH. Penelitian tersebut adalah Penanggulangan Kemiskinan Berbasis E-Warong Program Keluarga Harapan (Studi E-Warong LUBE Mugi Barokah Desa Klopogodo Kecamatan Gombang Kabupaten Kebumen Prov. Jawa Tengah) oleh Jakra Hardepa Riyadi, yang

meneliti proses penanggulangan kemiskinan berbasis E-Warong yang dilakukan oleh Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dengan anggota Penerima Manfaat PKH. Pembahasan utama adalah manajemen organisasi KUBE dan pemasaran/pengelolaan keuangan E-warong. Penelitian pada KUBE dengan jenis usaha berdagang sembako di daerah Gombang Kebumen ini menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui KUBE ternyata dapat berjalan dengan baik dan cukup berhasil karena dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga anggotanya. Keberhasilan ini selain karena motivasi yang kuat dan usaha yang serius dari anggota KUBE, juga tidak terlepas dari upaya pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping sosial yang memfasilitasi dan mendampingi dari sejak pembentukan kelompok, pembentukan usaha e-warong sampai berjalannya usaha. Mereka berperan sebagai fasilitator, broker, mediator, advolator, dan educator. (Riyadi JH, 2017). Penelitian yang telah dilakukan tersebut apabila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan penulis terdapat kesamaan yaitu meneliti upaya pemberdayaan masyarakat dengan subjek perempuan dari keluarga miskin yang menjadi penerima manfaat dari suatu program. Adapun perbedaannya dengan pemberdayaan yang diteliti penulis adalah pembentukan KUBE dan permodalan awal adalah dengan inisiatif sendiri yang dikumpulkan dengan menyisihkan uang bantuan sosial yang mereka terima.

Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian tentang Politik Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat: Kasus Ketergantungan Bantuan Sosial di Temanggung, Jawa Tengah ini menggunakan tekhnik menurut Miles dan Huberman yang terdiri dari tahap reduksi data atau data reduction, penyajian data atau data display serta tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi atau conclusion drawing/verification (Mei Hariyanti, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Kemiskinan merupakan masalah yang tak pernah ada habisnya, dinegara manapun di seluruh dunia pernah dan mungkin senantiasa menghadapi permasalahan ini. (Todaro cs, 2006). Dari hasil penelitian yang dilakukan Solikhin yang termuat dalam Jurnal tentang Kemiskinan di provinsi Jawa Tengah, diantaranya disampaikan bahwa pandemic covid 19 menimbulkan dampak persentase kemiskinan yang meningkat, kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang membutuhkan upaya ekstra untuk memberantasnya. (Solikhin, 2022).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2020. menyebutkan bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui 4 strategi dan 3 program. Strategi tersebut adalah pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil, dan sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Program sebagaimana dimaksud pada regulasi tersebut adalah Program bansos dan jaminan sosial, Program pemberdayaan masyarakat

dan penguatan UMKM, dan program lain terkait peningkatan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin

Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 menyebutkan bahwa Strategi kebijakan untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran ada 3 yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan

Bantuan sosial sudah ada sejak jaman dulu dimulai dari istilah *charity*, bantuan sosial merupakan perwujudan dari strategi dan program yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2020 yaitu strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, dan program tentang bansos dan jaminan sosial. Hal ini juga merupakan wujud dari strategi yang termuat di Instruksi Presiden No. 4 tahun 2022 yaitu pengurangan beban pengeluaran masyarakat. Akhir-akhir ini banyak sekali program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah desa. Misalnya Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai efek kenaikan Bahan Bakar Minyak (BLT BBM), Bantuan Langsung Tunai efek kelangkaan dan kenaikan Minyak Goreng (BLT Migor), Bantuan Kartu Jawa Tengah Sejahtera (KJS), Bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS), BLT bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT), BLT bersumber dari Dana Desa (BLT-DD), dan lainnya.

Hal ini merupakan struktur dimana bantuan sosial memang merupakan kebijakan pemerintah guna meningkatkan daya beli masyarakat, karena ada regulasi yang mengatur tentang pemberian bantuan sosial termasuk regulasi yang mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah dan desa untuk menganggarkan bantuan sosial. Sebenarnya hal ini baik adanya karena memang sangat membantu bagi para penerima, akan tetapi terkadang secara tidak langsung justru menimbulkan permasalahan baru yang tidak disadari bagi para penerima, yaitu menjadi *habit* atau kebiasaan, mereka menganggap bantuan sosial tersebut keberlanjutan sehingga apabila sudah menerima akan terus menjadi penerima bantuan sosial. Dampaknya apabila suatu ketika mereka tidak menerima maka akan muncul klaim bahwa hal tersebut tidak adil.

Strategi lain dari regulasi diatas yaitu peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil dapat diwujudkan salah satunya melalui program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat menurut Chamber adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang didalamnya memuat nilai-nilai sosial, dengan sifat *people centered*, *participatory* dan *sustainable* (Zubaedi, 2013).

Pemberdayaan ini tidak semata-mata bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat saja, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Pada pemberdayaan terdapat konsep-konsep yang mencerminkan paradigma baru dari pembangunan yang orientasinya adalah masyarakat dimana pembangunan

mengutamakan kepentingan dan kebutuhan, juga aspirasi dari masyarakat selaku subjek pembangunan. Pemberdayaan harus melibatkan partisipasi masyarakat karena mereka yang menjadi pelaku sehingga harus aktif berpartisipasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai tahap evaluasi. Pemberdayaan harus berkelanjutan sehingga perlu dipilih jenis usaha yang sesuai potensi dari pelaku atau masyarakat yang diberdayakan dan sesuai dengan pangsa pasar yang ada (Muhammad Alhada FH, 2021).

Di kabupaten Temanggung penerima manfaat Program Keluarga Harapan merupakan salah satu penerima bantuan sosial, dan mereka melakukan pembedaan dari KPM lainnya yaitu secara kontinyu menyisihkan sebagian uang yang diterimanya dan menjadikan uang itu sebagai modal awal bagi usaha kelompok. Mereka punya inisiatif dan melakukan usaha yang berbeda dari sebagian besar penerima bantuan sosial yang pada umumnya membelanjakan uang yang mereka terima untuk kebutuhan konsumtif sesuai yang menjadi tujuan pemerintah dalam memberikan bantuan sosial yaitu untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Mereka melakukan kegiatan pemberdayaan melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dimana KUBE tersebut merupakan suatu wadah yang bertujuan melakukan kegiatan sosial dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Ada 4 *point* penting tentang KUBE yang merupakan wadah pemberdayaan masyarakat terkait dengan penanggulangan kemiskinan, yaitu: dapat menjadi sarana efektif untuk mengatasi beberapa keterbatasan, dapat menjadi sarana pembelajaran guna meningkatkan kompetensi anggotanya, dapat meningkatkan kemampuan berorganisasi, dan dapat meningkatkan kebersamaan, kekeluargaan, kegotongroyongan, dan kepedulian (Tami AZ, 2020).

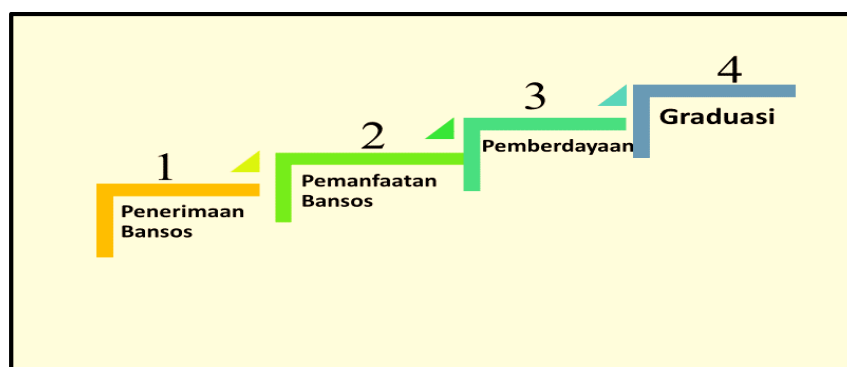


Diagram 1. Skema Upaya Pemberdayaan dari Penerima Bantuan Sosial
Diolah penulis

Skema tentang tahapan upaya pemberdayaan dari para penerima bantuan sosial Program keluarga Harapan ada 4, meliputi tahap penerimaan bansos dimana mereka memperoleh bantuan sosial dari pemerintah yaitu bansos PKH, BPNT, dan lainnya. Tahap kedua adalah pemanfaatan bantuan sosial, dimana pada tahap ini bantuan sosial yang dimaksudkan oleh pemerintah sebagai alat untuk meningkatkan daya beli

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok bagi keluarga tidak secara total di habiskan untuk hal yang sifatnya konsumtif tetapi mereka menyisihkannya untuk ditabung dan iuran di kelompok sebagai modal usaha kelompok. Hal ini mereka lakukan setiap kali mereka menerima bantuan sosial sehingga lama-lama uang yang mereka kumpulkan menjadi banyak dan cukup modal untuk mendirikan usaha kelompok atau KUBE. Tahap ketiga adalah pemberdayaan, dimana mereka yang telah berkelompok dalam KUBE mendirikan usaha ekonomi produktif sesuai potensi yang mereka miliki. Mereka diupayakan untuk dapat meningkatkan kemampuannya melalui bimbingan teknis dan pelatihan ketrampilan dengan didampingi oleh para pendamping sosial dan pemerintah setempat, Tahap terakhir adalah graduasi, di mana usaha makin berkembang dan keuntungannya sudah dapat meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok. Berkembangnya usaha membuat tingkat kesejahteraan meningkat sehingga mereka menyatakan untuk graduasi dalam arti menyatakan diri sudah berada pada taraf yang sejahtera dan mengundurkan diri sebagai penerima bantuan sosial.

KUBE yang dibentuk para penerima bantuan sosial PKH di Kabupaten Temanggung ini yang melakukan Usaha ekonomi Produktif dengan Modal Usaha Mandiri atau sering disingkat MUM. Sebagai contoh, KUBE Sendang Rejeki dan KUBE Harapan, yang berada di wilayah Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Kandangan, keduanya bergerak di bidang usaha berdagang sembako. Kedua KUBE ini mempunyai kesamaan yaitu mengumpulkan modal awal secara mandiri dari para anggotanya sejumlah Rp.100.000,- setiap kali mereka menerima bantuan sosial. Dengan modal yang tidak banyak, tidak membuat mereka patah semangat tetapi justru memacu untuk lebih serius menekuni usaha barunya. Semula karena keterbatasan modal hanya menerima pesanan sembako dari para anggota saja, lama kelamaan berkembang karena modal sudah makin banyak sehingga bisa menerima pesanan dari luar. Posisi saat ini KUBE tersebut sudah mempunyai warung/toko dengan jenis barang yang makin beragam.

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat melalui KUBE ini tidak terlepas dari peran pendamping sosial, yaitu pendamping PKH, pekerja sosial, penyuluh sosial, dan juga pemerintah setempat. Pendamping sosial dan Koordinator PKH memberikan pendampingan baik lewat pertemuan kelompok maupun home visit, mereka juga menghubungkan dengan sistem sumber seperti tempat kulakan dan grosir, selain itu juga mengusulkan agar bisa menjadi e-warung. Pemerintah desa membantu pengusulan kegiatan pemberdayaan KUBE lewat Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang. Upaya mandiri dan keberhasilan dari KUBE tersebut, membuat pemerintah kabupaten merasa perlu untuk memberikan apresiasi dan dukungan pada mereka sehingga memberikan stimulant bantuan pada tahun 2022 sebanyak Rp.10.000.000,- per KUBE. Bantuan ini bisa menambah modal guna mengembangkan usahanya. Kemajuan KUBE bisa terwujud dengan adanya dukungan oleh banyak pihak yang saling bersinergi satu sama lain.

Salah satu tugas pemerintah terkait pemberdayaan sosial adalah melakukan supervisi dan bimbingan sosial pada KUBE. Tahun 2022 dilakukan kegiatan Bimbingan Tekhnis, Narasumber yang biasanya diambil dari unsur pemerintah dan usahawan, kali ini di tambah dengan narasumber dari KUBE yang mandiri, mereka menyampaikan *succses story* KUBE nya, dengan harapan bisa memberikan pencerahan dan motivasi kepada KUBE lain sehingga bisa mencontoh langkah-langkah kesuksesannya.

Pemerintah yang semula menjadi penentu jenis usaha KUBE, sekarang cenderung menyerahkan pilihan usaha pada KUBE itu sendiri sehingga KUBE bisa memilih sesuai potensi diri mereka yang ingin dikembangkan. Pada era sebelumnya jenis usaha tidak dipilih sendiri tetapi ditentukan pemerintah, dan seringnya adalah ternak kambing dengan asumsi pada wilayah perdesaan banyak rumput sehingga apabila memelihara kambing dirasa tepat karena tidak memerlukan biaya untuk membeli pakan. Tanpa disadari bahwa tidak semua desa banyak rumput apalagi pada musim kemarau panjang.

KUBE Sendang Rejeki dan KUBE Harapan melakukan jenis usaha sesuai dengan potensi yang mereka miliki, mereka menentukan sendiri pilihannya dan untuk permodalannya mereka mengumpulkan sendiri secara pribadi pada saat mereka menerima bantuan. Pemerintah Kabupaten baru memberikan penguatan kapasitas dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif justru setelah usaha mereka berjalan dengan tujuan memberikan stimulant bantuan yang dimaksudkan agar memperkuat usaha yang mereka jalankan. Karena atas inisiatif sendiri maka mereka cenderung punya rasa memiliki yang kuat pada apa yang mereka jalani sehingga mereka menjalankan usaha ekonomi produktif tersebut dengan semangat dan bersungguh-sungguh, sehingga KUBE dapat dikatakan berhasil. Pemberdayaan masyarakat melalui KUBE di Kabupaten Temanggung menghasilkan sesuatu yang positif, yaitu KUBE berhasil dalam usaha ekonomi produktif yang dilakukannya dan anggotanya banyak yang telah “Graduasi” dan menyatakan diri keluar dan tidak menerima Bansos lagi, dengan harapan Bansos dapat ganti diberikan pada orang lain yang lebih ber hak mendapatkannya.

Penulis menganalisis penelitian ini dengan teori strukturasi dari Anthony Giddens, dimana teori strukturasi adalah upaya untuk menggabungkan agen dan struktur, atau dapat dikatakan bahwa teori strukturasi merupakan suatu teori yang menjelaskan hubungan struktur sosial dan agen manusia dalam suatu sistem sosial. Seluruh tindakan sosial memerlukan agen dan struktur karena keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga sering disebut dwi rangkap. Dalam melakukan tindakan sosial, ada 3 (tiga) hal internal dalam diri pelaku atau Agent yaitu motivasi di bawah sadar, kesadaran praktis, dan kesadaran diskursif. Strukturasi merupakan sifat-sifat yang memungkinkan praktik sosial serupa dapat dijelaskan sebagai terjadi melintasi ruang dan waktu. Sistem dan individu atau struktur dan Agent saling mempengaruhi dikarenakan sistem dan individu dipandang sebagai entitas yang terpisah sehingga menciptakan dualitas. (Siti Nurbayani, 2012)

Pada tema ini maka yang disebut agen disini adalah para penerima manfaat Program keluarga harapan yang menerima bantuan sosial. Mereka yang mempunyai tujuan sama dan potensi sama membentuk kelompok dan mengupayakan kegiatan pemberdayaan berupa usaha ekonomi produktif. Mereka melakukan tindakan diskursif dengan menyisihkan uang bantuan sosial yang mereka terima untuk modal awal usaha kelompok. Mereka selaku “agen” ingin berubah tidak stagnan sebagai penerima bantuan sosial, mereka berusaha untuk mengembangkan potensinya secara berkelompok dan melakukan pemberdayaan.

Tentu saja hal ini tidak serta merta terwujud tapi perlu kerjasama dan bimbingan dengan berbagai pihak, utamanya dengan pendamping sosial yang merupakan “Aktor” yang membantu terjadinya perubahan. Mereka secara kontinyu memberikan pendampingan, baik dalam acara pertemuan secara kelompok maupun home visit. Mereka juga membantu menghubungkan dengan sistem sumber terkait yang bisa membantu meningkatkan pengembangan usaha ekonomi produktif dari KUBE.

Giddens berupaya menggabungkan antara agent dan struktur, bagi Giddens agen dan struktur merupakan dua hal yang saling berkesinambungan. Tiga gugus fungsi dalam struktur yakni fungsi signifikansi, legitimasi, dan dominasi. Signifikansi yang terjadi yaitu Kebijakan pemerintah berupa pemberian Bansos yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat dengan jenis usaha yang ditentukan oleh pemerintah mengalami pergeseran dengan tindakan sosial yang dilakukan oleh Agent, dimana bantuan sosial tidak hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif tapi justru digunakan untuk modal pemberdayaan, bahkan ada usaha dari Agent untuk tidak stagnan menjadi penerima bantuan sosial dengan kata lain ingin *Graduasi*. Pemerintah juga cenderung membebaskan jenis usaha yang dipilih dengan asumsi bahwa pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan potensi yang dimiliki akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. Teori dari Giddens ini memberikan pemahaman bahwa penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang menerima bantuan sosial bukanlah suatu obyek pasif yang harus diberdayakan oleh pihak lain akan tetapi mereka merupakan subjek aktif yang ternyata dapat memberdayakan diri mereka sendiri dengan mengubah struktur sosial yang ada. Banyak diantara penerima manfaat bantuan sosial ini yang telah graduasi dan menolak untuk menerimanya, mereka mempunyai pemikiran bahwa bantuan tersebut akan lebih baik apabila diterima oleh orang lain yang kondisinya jauh dari sejahtera.

Giddens menyampaikan bahwa Struktur dan agen saling mempengaruhi, hal ini terlihat pada Pemerintah Kabupaten Temanggung yang menangkap hal positif dari kegiatan dilakukan para agen ini, dan menjalin kerjasama dengan mereka dalam pelaksanaan Bimbingan Tekhnis bagi KUBE dengan cara menjadikan mereka sebagai narasumber yang menceritakan *success story* yang mereka jalani dengan harapan dapat memberikan inspirasi dan membangkitkan semangat bagi penerima bantuan sosial yang tergabung dalam KUBE yang baru terbentuk. Pengaruh lainnya adalah penentuan jenis

usaha KUBE yang biasanya ditentukan pemerintah sekarang bisa dengan bebas ditentukan oleh masing-masing KUBE berdasar potensi alam dan potensi diri yang mereka miliki dengan harapan agar usaha ekonomi produktif yang mereka lakukan akan lebih berhasil guna dan berdaya guna.

Penutup

Maraknya bantuan sosial ternyata menciptakan zona nyaman bagi penerima dan berefek membuat ketergantungan sebagian penerimanya, akan tetapi hal ini tidak berlaku untuk semuanya karena terdapat beberapa orang penerima manfaat yang ingin melakukan perubahan tidak ingin selamanya menjadi penerima bantuan sosial dan namanya tercatat dalam data kemiskinan. Pemerintah sudah membuat regulasi yang memuat kebijakan yang baik tentang penanggulangan kemiskinan, tetapi perlu konsisten dalam pelaksanaannya, sehingga akan tercapai sesuai yang diharapkan. Antara bantuan sosial dan pemberdayaan agar ada keseimbangan, dan dalam pemberdayaan harus melihat potensi yang dimiliki serta ditekankan soliditas kelompok serta pendampingan yang berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan dalam keterbatasan waktu sehingga hasilnya kurang optimal, diupayakan adanya keberlanjutan riset untuk lebih menyempurnakan hasil analisis. Walaupun begitu semoga penelitian ini tetap dapat memberi sumbangan pemikiran bagi kasus yang sama yaitu perlu adanya telaah lebih lanjut dari para pembuat kebijakan agar dalam menentukan suatu program tidak menimbulkan ketergantungan dari penerimanya. selain itu bagi masyarakat khususnya penerima bantuan sosial agar dapat mengembangkan wawasan, pengetahuan, dan ketrampilan sehingga tidak menjadikan bantuan sosial sebagai sesuatu yang dinanti kehadirannya dan merasa hal itu menjadi suatu “hak” yang harus terpenuhi.

Referensi

- BPS, (2022). *Statistik Kesejahteraan Rakyat*. Temanggung: Badan Pusat Statistik
- BPS, (2023). *Kabupaten Temanggung dalam Angka*. Temanggung: TM Percetakan dan Advertising
- BPS, (2023). *Persentase Penduduk Miskin Maret 2022 turun menjadi 9,54%*, diakses dari <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html>
- BPS Provinsi Jawa Tengah, (2022). *Kemiskinan 2020-2022*, diakses dari <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>
- Dindukcapil Kab. Temanggung, (2023). *Data Jumlah Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2022*. Diunduh dari https://dindukcapil.temanggungkab.go.id/data/jumlah_penduduk

- Ghifari, Hanif Reyhan, (2023). Ketergantungan Bansos Picu RI sulit Keluar dari Kemiskinan, di akses dari <https://tirto.id/ketergantungan-bansos-picu-ri-sulit-keluar-dari-kemiskinan-gGIT>
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang *Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem*
- Jatenginfo.id, (2023). Tahun 2022 Angka Kemiskinan di Temanggung Menurun, Urutan 13 se-Jawa Tengah. <https://jatenginfo.inews.id/read/232214/tahun-2022-angka-kemiskinan-di-temanggung-menurun-urutan-13-se-jawa-tengah>.
- John W. Creswell, (1994). *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*, California: SAGE Publications, Inc.
- Kristina, (2021). Apa Itu Bansos, ini Pengertian, jenis dan Penerimaannya, diakses dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5761964/apa-itu-bansos-ini-pengertian-jenis-dan-penerimaannya>
- Mei hariyanti, (2015). *Analisis Data Kualitatif Miles dan Huberman* , diakses <https://www.kompasiana.com/meykurniawan/556c450057937332048b456c/analisis-data-kualitatif-miles-dan-hubermen>
- Muhammad Alhada FH, (2021). “Kajian Teoritis Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi Kreatif”, *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Travelling, and Creative Economy*, Vol. I Issue 2, 2021.
- Muhammad Iqbal, Hasio Marto (2022).”Pengelolaan Keuangan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Toli-Toli”, *DIKMAS Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian*, Vol. 02, (3), 2022
- Munawar Noor, (2011). “Pemberdayaan Masyarakat”, *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Vol. I No. 2, 2011.
- Nurbayani. Siti, (2012). *Teori Strukturasi Anthony Giddens Untuk Analisis Sosial*, diakses dari http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/1970071111994032-SITI_NURBAYANI_K/Karya/teori_strukturasi_giddens.pdf
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang *Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota*
- Riyadi, Jakra Hardepa. (2017). *Penanggulangan Kemiskinan Berbasis E-Warong Program Keluarga Harapan; Studi E-Warong LUBE Mugi Barokah Desa Klopogodo Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen Prov. Jawa Tengah*, (Tesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), Diakses dari <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/34309/>
- Robert K Yin, (2002) *Case Study Research Design and Methods*, third Edition. London: Sage Publications.

- Solikhin. (2022). “Kemiskinan di Propinsi Jawa Tengah 2018-2021, apa saja Penyebabnya?,” *AMAnu Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 5 No. 1, 2022.
- Suparjan. Suyatno, (2003). *Pengembangan Masyarakat: dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*, Yogyakarta; Aditya Media
- Sugiyono, (2012). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung; Alfabeta
- Siti Nurbayani (2012), *Teori Strukturasi Anthony Giddens untuk Analisis Sosial*, di unduh dari http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/197007111994032-SITI_NURBAYANI_K/Karya/teori_strukturasi_giddens.pdf
- Tami AZ, Meyzi H, Febri Y, (2020). “Implementasi Program kelompok Usaha bersama (KUBE) dalam Pemberdayaan Fakir Miskin”, *JSDMU: Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul*, Vol. 1 No. 1, 2020.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. (2006), *Tanpa Tahun. Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan. Terjemahan oleh Harus Munandar*. Jakarta: Erlangga.
- W. Lawrence Neuman, (2003), *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*, New York: Pearson Education.
- Zubaedi, (2013). *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.